PEMERINTAH TETAPKAN

27 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama

JAKARTA (KR) - Pemerintah menetapkan 27 hari libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2025, yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, ke-27 hari libur itu terdiri 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. "Pada 2025 Pemerintah memutuskan 27 hari libur," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (14/10).

Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam beraktivitas. Selain itu sebagai rujukan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan dalam menentukan perencanaan program-program kerja ke depan.

(Ati)-d

Proses

Sambungan hal 1

perpanjangan sertipikat HGB di lingkungan Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY cq Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

"Perwakilan Ombudsman RI DIY telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 14 laporan. Pemeriksaan selama sebulan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk LHP setebal 87 halaman yang berisi pendapat, kesimpulan dan saran tindakan korektif dan telah kita serahkan ke Kanwil BPN DIY, Kantor BPN/Pertanahan Kota Yogya untuk segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Sebelumnya, LHP sudah diserahkan kepada Kepala Kanwil BPN DIY dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang hadir bersama jajarannya. "Akan kita pelajari dan koordinasikan, kita menghargai upaya Ombudsman. Perihal Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PG) kalau memang itu milik Kasultanan atau Kadipaten Pakualaman ya harus dikembalikan. Atau bila statusnya Tanah Negara akan kita periksa teliti dari sejarah, dokumen yang ada," ucap Kepala Kanwil BPN DIY Drs Suwito SH MKn usai menerima LHP.

Salah satu Koordinator Forum Peduli Tanah DIY untuk NKRI (Forpeta) Tjipto menyebutkan, warga resah karena terkatung-katung dalam pengurusan perpanjangan HGB. "Tidak ada kepastian kapan perpanjangan HGB kami diproses BPN," ucap pemilik tanah HGB di Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta itu.

Disebutkan, pemohon perpanjangan HGB di Kota Yogya dari Anggota Forpeta ada sekitar 150 HGB, sementara tercatat di luar anggota Forpeta ada 800 HGB permohonan tidak dilanjuti, ditambah yang ada di notaris bisa mencapai 1.000 sertipikat HGB yang sudah habis sejak tahun 2000 hingga saat ini belum jelas kepastiannya. "Akibatnya tanah HGB tersebut tidak bisa menjadi agunan bank apalagi dijual," keluh Melly, warga lainnya.

Sementara Ketua Ormas Gerakan Jalan Lurus dan Gerakan Antimafia Tanah (Gamad) Riyanta yang mendampingi warga menyatakan, BPN/Pertanahan yang tidak memproses perpanjangan HGB karena ada maladministrasi yang harus segera dibenahi. "Menurut UU penyelenggara pelayanan publik yang tidak menjalankan Standar Pelayanan Publik yang sudah diselenggarakan dapat dikenakan sanksi sesuai PP 94/2021 tentang Disiplin ASN. Harapannya kita semua harus sadar Indonesia negara hukum, semua praktik penyelenggaraan bernegara dengan hukum positif," tegas mantan Anggota DPR RI Komisi II ini.

Maka sesuai UU 30/2014 tentang UU Administrasi Pemerintah, bahwa asas legalitas merupakan roh penyelenggaraan pemerintahan negara. "Terhadap penyelenggara pelayanan publik yang tidak jalankan sesuai PP bisa juga dilakukan tuntutan perdata (ganti rugi)," tegasnya

Riyanta berharap elemen masyarakat sipil, LSM, NGO dan media untuk bersama-sama membangun penguatan Lembaga Ombudsman sebagai lembaga pelayanan publik untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. "Rekomendasi dari Lembaga Ombudsman ini kita harapkan bisa mendorong BPN/Pertanahan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik sebaik-baiknya," tandasnya.

Budhi Masturi menegaskan, waktu selama 30 hari untuk BPN/Pertanahan DIY dan Kota Yogya untuk menjalankan rekomendasi yang disampaikan Lembaga Ombudsman DIY. "Bila tidak dijalankan kita serahkan ke Ombudsman Pusat untuk tindakan lebih lanjut," ujarnya

Penelusuran yang dilakukan BPN seharusnya tetap dengan memperhatikan Diktum Kedua dan Keempat UUPA dan rentang waktu penelusurannya tidak sampai melampaui tahun pemberlakuan UUPA sepenuhnya di DI Yogyakarta vide Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984, dan Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984.

"Kami berpendapat bahwa pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik dapat dilakukan manakala status kepemilikan tanahnya tidak bermasalah (clear and clean)," tandas Budhi.

(Vin)-d

Prabowo

Sambungan hal 1

sinyal terkait posisi menteri yang akan dia tempati dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Ya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Saan Mustopa menjelaskan partainya tidak mengirimkan nama untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran karena memperhatikan etika dan kepantasan. "Jadi sekali lagi ini lebih kepada soal etika dan kepantasan saja karena memang NasDem bukan partai pendukung (saat Pilpres 2024). Sehingga kalau misalnya NasDem ribut soal kabinet rasanya kurang pas lah kan gitu loh," katanya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (14/10).

Menurut Saan, partainya saat Pilpres 2024 digelar tidak ambil bagian sebagai partai politik pendukung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Terkait dengan kabinet, NasDem kan selalu mengatakan dalam ini Pak Surya, ini soal etika saja dan kepantasan saja. NasDem ini kan ketika Pilpres 2024, 14 Februari yang lalu itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo," ujarnya.

Untuk itu, NasDem tahu diri sehingga mendahulukan partai politik yang tergabung dalam KIM untuk mengisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. "Karena itu secara etika tentu NasDem istilahnya tahu diri ya, bahwa dia memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo-Pak Gibran untuk mengisi komposisi di kabinet. Jadi, kami memberikan kesempatan terlebih dahulu lah ya kepada seluruh partai pendukung untuk mengisi pos-pos yang ada di kabinet," tuturnya.

(Ant/Has)-d

Kapasitas

Sambungan hal 1

Berbeda dengan masa sebelum Reformasi, kini menjadi wakil rakyat relatif mudah bagi mereka yang punya modal ekonomi dan popularitas. Termasuk kalangan selebritas. Namun mereka harus membayar mahar pada parpol pengusung. Ini cara pragmatis parpol dalam mendapatkan keuntungan. Pertama, mendapatkan pemasukan finansial. Kedua, mendapat tuah popularitas selebritas yang bisa mendongkrak elektabilitas parpol.

Di kalangan masyarakat muncul kesangsian: apakah para selebritas yang lolos ke Senayan itu memiliki kemampuan yang cukup baik secara ideologis maupun intelektual?

Politik adalah dunia gagasan yang berkaitan dengan persoalan bernegara dan bermasyarakat. Politik selalu menuntut kemampuan visioner para politisi di dalam membaca, menafsir dan mewujudkan nilai-nilai yang dikandung dalam amanat konstitusi dan ideologi negara. Ini semua berkaitan dengan upaya luhur menciptakan keadilan, kesejahteraan dan mutu peradaban bangsa dan negara. Ini tantangan yang besar. Tidak main-main.

Ketika selebritas menyandang status sebagai politisi, semestinya terjadi transformasi budaya dari sosok penghibur menjadi sosok pejuang konstitusi.

Masyarakat akan menagih kemampuan mereka di dalam menjalankan tugas-tugas legislatif yang berkaitan dengan tiga hal fundamental. Yakni mengontrol jalannya pemerintahan (politik pengawasan), membuat regulasi (politik regulasi) dan membuat anggaran (politik anggaran). Semua dilakukan berbasis pada konstitusi.

Anggota legislatif yang berlatar belakang ilmu politik, pemerintahan, sosial, tata negara, ekonomi, hukum dan ilmu lainnya yang relevan, tidak terlalu kesulitan menjalankan tugas-tugas legislatif. Begitu juga dengan orang-orang yang berproses dan tumbuh di dalam dua praksis politik. Yakni mereka yang menjadi anggota parpol maupun individu di luar parpol, misalnya aktivis politik, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa menjadi anggota legislatif mutlak harus memiliki kemampuan intelektual, kekayaan pengalaman sosial, politik dan kecerdasan di dalam menemukan berbagai jawaban atas persoalan di ranah publik.

Apakah para selebritas mampu memenuhi berbagai persyaratan itu? Ini pertanyaan besar dan mendasar.

Ornamen Parlemen

Publik tidak berharap para selebritas hanya jadi ornamen penghias parlemen. Tanpa sumbangan ide. Tanpa mau berdarah-darah memperjuangkan nilai-nilai konstitusi. Jangan sampai para selebritas hanya jadi parasit atau pelaku niaga politik yang hanya mencari keuntungan finansial dan citra atau status ëterhormatí.

Kecemasan atas kapasitas selebritas itu coba diredam oleh pendapat yang mengatakan: bukankah para selebritas punya tim ahli? Mereka bisa menyewa para pakar untuk mendukung kinerjanya sehingga mereka seolah-olah hebat. Keberadaan tim ahli sangat dibutuhkan, tapi mereka tidak mutlak menentukan kinerja para selebritas di parlemen.

Politik itu sangat dinamis. Tidak mandek dalam sejumlah teks yang dibaca dan dihafal. Dibutuhkan kemampuan ekstra di dalam menjawab berbagai persoalan yang penting dan urgent. Tanpa tabungan ilmu dan pengetahuan serta kekayaan pengalaman yang bernilai, para selebritas akan tereduksi menjadi sekadar pengombyong alias figuran politik di parlemen.

Dunia politik bukan dunia hiburan tapi dunia olah ide dan tarung argumentasi dan visi politik. Tak sekadar terampil dan pintar, dunia politik parlemen juga menuntut integritas, komitmen dan dedikasi. Semua terangkum dalam idealisme politik.

Semoga para selebritas di parlemen bisa eksis menjadi politisi yang andal. Tak terkena kutukan politik uang, di mana politisi bisa menjadi sekadar instrumen kekuasaan dan pemburu laba.

(Penulis, praktisi budaya dan esais)-d

Koperasi Jasa Utama Adakan Capacity Building

YOGYA (KR) - Menghadapi tantangan, persaingan dan perkembangan regulasi yang semakin dinamis, Koperasi Jasa Utama melaksanakan Capacity Building dan Pendidikan Dasar Perkoperasian bagi Pengurus, Karyawan dan Anggota. Kegiatan disambut antusias, diikuti 100 anggota.

KR-Istimewa

Peserta mengikuti Capacity Building dan Pendidikan Dasar Perkoperasian.

"Anggota koperasi harus berperan aktif dalam membesarkan koperasi, salah satu upayanya dengan aktif memanfaatkan produk dan layanan koperasi, misalnya belanja kebutuhan bulanan anggota, simpanan maupun pinjaman. Anggota koperasi juga harus mengetahui usaha-usaha yang dilakukan koperasi dan perkembangannya," kata Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM DIY Setya Hastuti, Senin (14/10).

Ketua Koperasi Jasa Utama Arif Wijayanto mengatakan, Koperasi Jasa Utama merupakan salah satu koperasi binaan Dinkop UKM DIY dengan predikat Sehat dan mendapatkan penghargaan sebagai Koperasi Modern. Koperasi Jasa Utama terus melakukan pengembangan layanan termasuk digitalisasi.

"Salah satu bidang usaha kami menyediakan kebutuhan sumber daya manusia bagi perusahaan. Meliputi tenaga administrasi, cleaning service, pengemudi dan office boy. Karena itu, kegiatan Capacity Building ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja," terangnya.

Acara ini menghadirkan narasumber Dr Dody Hartanto MPd yang menyatakan, pengembangan pribadi sangat diperlukan anggota koperasi, khususnya yang masih tergolong milenial untuk meningkatkan performa dan siap menghadapi dunia kerja.

(Ria)-d

Semarak

Sambungan hal 1

menuju Kulonprogo yang lebih baik, maju dan sejahtera," kata Pj Bupati Kulonprogo Ir Srie Nurkyatsiwi MMA pada Malam Tirakatan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Kulonprogo di Aula Adhikarta Gedung Kaca Kompleks Kantor Bupati setempat, Senin (14/10) malam.

Malam tirakatan diisi seminar dengan pembicara dr Agus Ali Fauzi PGD PallMed (ECU) dari RSUD dr Soetomo Surabaya. Nampak hadir Ketua Sementara DPRD Kulonprogo Aris Syarifudin dan unsur Forkompimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Pj Bupati Siwi mengatakan, sudah sepantasnya mengingat dan mengenang perjuangan *Ngarsa Dalem* Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Berkat keluhuran budi dan kebesaran hati serta keikhlasan beliau-beliau terwujudlah wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kabupaten Kulonprogo dan Kadipaten Pakualaman atau Kabupaten Adikarto.

"Selanjutnya diambil keputusan atau kesepakatan wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulonprogo dan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarto, dijadikan satu wilayah baru dengan nama Kabupaten Kulonprogo," ungkapnya.

Berdasarkan gagasan dan pemikiran luhur *Ngarso Dalem* Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII serta keluarnya Undang-Undang Nomor 18/ 1951, maka pada tanggal 15 Oktober secara resmi ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Kulonprogo.

Secara yuridis formal Hari Jadi Kabupaten Kulonprogo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diundangkannya UU No 18/1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Selanjutnya pada 29 Desember 1951 proses administrasi penggabungan telah selesai dan pada 1 Januari 1952 administrasi pemerintahan baru mulai dilaksanakan dengan pusat pemerintahan di Wates. "Dengan sedikit mengenang peristiwa sejarah Kabupaten Kulonprogo ini, mari kita renungkan bersama peristiwa-peristiwa yang sudah kita lewati sebagai bahan evaluasi dan rasa syukur kita. Sehingga bisa menjadi landasan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun mendatang," tutur Siwi.

Tema Hari Jadi ke-73 Kabupaten Kulonprogo pada 2024 'Semarak Kota Gebleg'. Tema tersebut merupakan akronim dari Semarak (Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya dan Berkelanjutan), Kota (Kolaborasi dan Tangguh) serta Gebleg (Greget Bersinergi Luas untuk Ekonomi Inklusi).

(Rul)-d

Peluang

Sambungan hal 1

Bahrain untuk meraih 3 poin di klasemen sementara. Dengan berbekal 3 poin dari tiga laga awal, Indonesia diharapkan benar-benar mampu meraih kemenangan demi membuka peluang untuk mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026.

Meski performa China di tiga laga mereka tak menunjukkan keistimewaan, namun untuk mewujudkan target kemenangan di laga ini, Indonesia wajib untuk tidak memandang remeh lawan. Terlebih, dari catatan sejarah pertemuan kedua negara selama ini, tuan rumah memang jauh lebih mendominasi. Bahkan, dari rekor pertemuan di lima laga terakhir, Indonesia tidak pernah meraih kemenangan.

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat ini memang sudah melupakan laga melawan Bahrain dan fokus menghadapi China demi meraih kemenangan di laga penting ini. "Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja. Kami hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca. Karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya," ujarnya dikutip dari laman resmi PSSI.

Kondisi cuaca di Qingdao sepertinya memang menjadi hal yang perlu diperhatikan jelang laga ini, karena Qingdao memiliki suhu 23 derajat dan kelembaban hingga 61 persen. Namun kondisi ini sepertinya tak akan banyak berpengaruh bagi pemain Timnas yang bermain di Eropa. Dengan kenyataan ini, Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memainkan para pemain yang selama ini bermain di Eropa demi mengamankan hasil positif di laga ini.

Nama-nama seperti Maarten Paes, Jay Idzes, Mees Hilgers, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, hingga Rafael Struick berpeluang untuk menjadi pilihan utama di laga ini. Dengan menurunkan pemain-pemain terbaiknya di laga ini, diharapkan kemenangan bisa diraih dan membuka peluang Indonesia untuk naik ke posisi *runnerup* klasemen sementara.

(Hit)-d

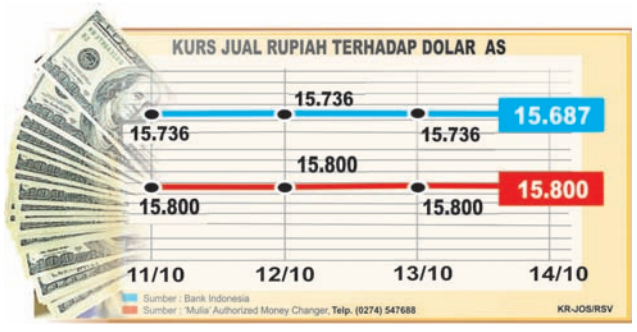

Prakiraan Cuaca — **15 Oktober 2024**

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Food Estate, Sesuai Harapan atau Sebatas Angan?

Raden Arditya Mutwara L
Dosen Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

BELAKANGAN media berita online kembali diramaikan dengan kabar seputar food estate. Bulan lalu bahkan Cak Imin menyebut program food estate milik pemerintah Jokowi terbukti kurang berhasil. Berkaitan dengan hal tersebut, Cak Imin meminta pemerintah melakukan evaluasi program dan segera membuat program baru untuk ketahanan pangan. Sementara itu pemerintah melalui Kementrian Pertanian, mengatakan bahwa program food estate berjalan dengan baik dan hasilnya positif.

Sebelum dibahas lebih jauh, mari kita lihat dulu apa definisi food estate. Mengutip dari buku pengembangan food estate milik Kementan (Kementrian Pertanian), food estate adalah program budidaya tanaman berskala luas atau lebih dari 25 hektar dengan konsep pertanian modern. Sistem pertanian yang digunakan adalah sistem industrial berbasis iptek, akses permodalan, dijalankan oleh organisasi dan dikelola secara modern. Berdasar pernyataan Kementan ada beberapa komoditas yang dikembangkan dalam program ini seperti padi, ubi kayu, kedelai, jagung, kacang tanah, tebu, dan lain-lain.

Dilihat dari tujuan dikembangkannya food estate di sejumlah wilayah adalah untuk memperkuat ketahanan pangan. Berikut rincian tujuannya, yang pertama food estate ditujukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan nasional dan dunia. Kedua, untuk mengantisipasi aliran keluar devisa negara guna pembiayaan impor beberapa komoditas pangan. Ketiga, ketersediaan lahan potensial cukup luas tapi dianggap belum tergarap maksimal. Laju alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi juga menjadi pertimbangan diadakannya program food estate.

Dikutip dari Tempo.co, sebenarnya laju alih fungsi lahan pertanian cukup tinggi terjadi di Pulau Jawa dan Bali, tidak di daerah Indonesia yang lain. Tetapi pemerintah tetap mencanangkan program tersebut (food estate) dikembangkan dari Sabang sampai Merauke, seluruh wilayah yang dianggap potensial. Disebutkan oleh para pakar lingkungan bahwasanya program food estate berpotensi merusak lahan karena perlunya program ini untuk membukan lahan secara besar-besaran. Risiko yang diambil tidak sebanding dengan hasil yang belum pasti didapat.

Prof Dr Muryani, yang merupakan Guru Besar Bidang Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga, mengatakan saat ini ketersedian lahan umumnya masih berupa lahan gambut dan hutan konservasi. Dikhawatirkan apabila lahan ini nantinya dialihfungsikan untuk program food estate maka fungsi awalnya sebagai penyerap karbon dan pengurangan efek gas rumah kaca akan hilang. Prof Subejo, pakar pertanian UGM, juga mengatakan bahwa program ini terkesan terburu-buru, lahan sudah dibuka padahal pelaku belum siap dan calon pembeli belum ada. Apabila pemerintah ingin program ini berhasil, maka libatkan masyarakat, imbuh Subejo.

Belakangan program food estate ini ramai lagi diperbincangkan sejak timbul penolakan skala besar yang dilakukan para perempuan di Desa Ria-Ria, Humbang Hasundhutan, Sumatera Utara. Mereka, para perempuan Desa Ria-Ria, mengatakan dulu sudah pernah melakukan perjuangan serupa tahun 1979 kala pemerintahan presiden Soeharto, kini mereka juga akan berjuang lagi untuk mempertahankan tanah mereka.

Program food estate yang sejatinya akan dikembangkan di Merauke juga menjadi perhatian banyak pihak. Meskipun pemerintah terlihat optimis program tersebut akan berhasil, tetapi tidak sedikit pihak yang menyangsikan hal tersebut. Pemerintah sepatutnya dapat berkaca pada kurang berhasil nya program serupa buatan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) tahun 2010, yang sampai saat ini tidak juga mewujudkan swasembada pangan.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park